

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 20 TAHUN
2018 TENTANG PENGELOAAN KEUANGAN DESA DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(Studi pada Desa Sira Jaya Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu)**

Oleh:

DEVI ELISA^{1*}

NIM: E1013161008

Dr. Sri Maryuni, M. Si², Drs. Tri Hutomo, M. Si²

*Email: e1013161008@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Daam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sira Jaya Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu. Masalah dalam penelitian ini adalah aparatur desa yang belum memahami penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes), kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan kebijakan, dan adanya keterlambatan waktu pelaporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati/Walikota. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan desain penelitian analisis eksploratif. Penelitian ini menggunakan teori George C. Edward III (dalam Subarsono 2005) yang terdiri dari : 1) Komunikasi, transmisi dan kejelasan informasi dalam penyampaian laporan keuangan desa belum berjalan secara optimal. 2) Sumber Daya, aparatur desa masih rendah sebab dari 7 orang aparatur desa hanya 1 orang saja yang berpendidikan S1, sedangkan yang lainnya hanya tamatan SMA dan SMP. Serta sarana dan prasarananya kurang memadai. 3) Disposisi, aparatur desa Sira Jaya telah menunjukkan sikap dan komitmen yang cukup baik dalam menjalankan tugasnya; 4) Struktur Birokrasi, prosedur-prosedur kerja antara aparatur- aparatur desa dalam pembagian tugas belum sesuai dengan prosedur yang ada. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah diharapkan bagi pemerintah atasan harus meningkatkan pelatihan dan pengarahan kepada pemerintah desa, aparatur desa harus aktif dan bertanggung jawab baik itu dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah desa.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

**IMPLEMENTATION OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS
REGULATION NO. 20 OF 2018 ON VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT
IN VILLAGE GOVERNMENT BUDGET**

(Study on Sira Jaya Village, Pengkadan Sub-District, Kapuas Hulu Regency)

By:

DEVI ELISA^{1*}

NIM: E1013161008

Dr. Sri Maryuni, M. Si², Drs. Tri Hutomo, M. Si²

*Email: e1013161008@student.untan.ac.id

1. Student of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University Pontianak.
2. Lecturer of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University Pontianak.

ABSTRACT

This research aims to describe and analyze the implementation of Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018 on Village Financial Management in the Village Government Budget in Sira Jaya Village, Pengkadan Sub-District, Kapuas Hulu Regency. The problems in this research are village apparatus who do not understand the use of the village financial system application, the lack of supporting facilities and infrastructure in implementing policy, and the delay in reporting the realization of the Village Government Budget to the Regent/Mayor. The method used qualitative method with exploratory analysis research design. This research used the theory of George C. Edward III (in Subarsono 2005), which consists of: 1) Communication, transmission and clarity of information in the delivery of village financial reports has not run optimally. 2) Resources, the qualification of village apparatus has been low because out of 7 village officials only 1 has an undergraduate degree, while the rest have only graduated from high school and junior high school. In addition, facilities and infrastructure are inadequate. 3) Disposition, the village apparatus of Sira Jaya village has shown a fairly good attitude and commitment in carrying out their duties; 4) Bureaucratic structure, working procedures between village apparatus in the division of tasks are not in accordance with existing procedures. It is suggested by the researcher that the superior government must increase training and direction to the village government and the village apparatus must be active and responsible both in the management and implementation of the village government.

Keywords: Implementation, Village Budget Management Policy



DAFTAR ISI

Abstrak	1
Abstrack	2
Daftar Isi	3
A. PENDAHULUAN	5
1. Latar Belakang Penelitian	5
2. Identifikasi Masalah Penelitian	7
3. Fokus Penelitian	7
4. Rumusan Masalah Penelitian	8
5. Tujuan Penelitian	8
6. Manfaat Penelitian	8
B. TINJAUAN PUSTAKA	8
1. Pengertian Kebijakan Publik	8
2. Implementasi Kebijakan Publik	11
3. Tahap-tahap Implementasi Kebijakan	13
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan	13
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	14
6. Manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	15
7. Hasil Penelitian Relevan	15
C. METODE PENELITIAN	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Langkah-langkah Penelitian	16
3. Lokasi dan Waktu Penelitian	16
4. Objek dan Subjek Penelitian	17
5. Teknik Pengumpulan Data	17
6. Alat Pengumpulan Data	18
7. Teknik Keabsahan Data	18
8. Teknik Analisis Data	18
D. HASIL PENELITIAN	19
1. Komunikasi	19
2. Sumber Daya	19
3. Disposisi	20

4. Struktur Birokrasi	20
E. PENUTUP	20
1. Komunikasi	20
2. Saran	21
F. REFERENSI	21
1. Buku-buku	21
2. Dokumen	22



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan kebijakan keuangan tahunan pemerintah desa yang disusun berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pengelolaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mudah dilakukan. Pada sisi yang lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan desa baik dari sisi pendapatan maupun sisi belanja.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multi fungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan bernegara. Hal tersebut terutama terlihat dari komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, agar fungsi pengeolaan APBDes dapat berjalan secara optimal, maka sistem anggaran dan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada dasarnya adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas (Sumpeno, 2013):

1. Pendapatan Desa

Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

2. Belanja Desa

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis.

3. Pembiayaan Desa

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas Penerimaan Pembiayaan

dan Pengeluaran Pembiayaan yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenisnya.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sira Jaya Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu, seharusnya membutuhkan pengelolaan yang baik yang transparan dan akuntabel, sementara pengelolaan tersebut pastinya membutuhkan pegawai yang berkompeten di bidangnya. Artinya, dalam implementasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berorientasi pada anggaran berbasis kinerja/prestasi, yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Tapi pada kenyataannya, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sira Jaya Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu terkadang mengalami keterlambatan dalam menyusun laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Keterlambatan tersebut disebabkan lamanya penulisan laporan dikarenakan kurang memahami aplikasi

sistem keuangan desa (Sikeudes) dan kurangnya sarana dan prasana (komputer, serta jaringan yang kurang mendukung).

Dengan adanya keterlambatan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa menyebabkan anggaran dana desa yang seharusnya sudah cair menjadi terhambat. Akibatnya pembangunan yang seharusnya sudah terlaksana sejak Januari menjadi bergeser ke April. Inilah yang sering terjadi di Desa Sira Jaya Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu, terutama pada pembangunan jalan dan jembatan.

Keterlambatan pelaksanaan pembangunan tersebut mempengaruhi pengelolaan laporan keuangan yang akhirnya berdampak pada gaji atau honor aparat desa yang juga akan mengalami keterlambatan. Adapun sanksi yang diberikan terkait dengan keterlambatan pelaporan dana desa adalah berupa penundaan penyaluran dana desa sampai dengan diterimanya dokumen tersebut (PP RI NO 60 Tahun 2014).

Salah satu kegiatan Desa Sira Jaya Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu secara rutin melaksanakan kegiatan penyusunan rencana pembangunan desa melalui kegiatan Musrenbang desa dan juga membuat rencana anggaran kerja selama satu tahun anggaran dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes) yang dibahas bersama Badan Musyawarah Desa (BMD) yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) tahunan. Kegiatan tersebut tidak berjalan lancar, penyebabnya mayoritas aparaturnya penyelenggara pemerintahan desa kurang menguasai ilmu teknologi.

Kaitannya dengan penelitian ini, ialah dalam penelitian ini memfokuskan pada implementasi kebijakan. Kebijakan yang dimaksud dalam kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Untuk mengetahui proses pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sira Jaya Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu, maka pada penelitian ini dilihat dari beberapa aspek yang mempengaruhi pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan, di antaranya komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di Desa Sira Jaya Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu, maka dilakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Pada Desa Sira Jaya

Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu).

2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Aparatur desa yang belum memahami penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sira Jaya Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sira Jaya Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Adanya keterlambatan waktu pelaporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Bupati/Walikota.

3. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini terarah dan tidak meluas, penulis memfokuskan penelitian pada faktor-faktor yang menghambat implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di

Desa Sira Jaya Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu.

4. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu, "Faktor-faktor yang menghambat implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sira Jaya Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu?"

5. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sira Jaya Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu.

6. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi tentang pengembangan konsep mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa, khususnya mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai sumber untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang sejenis.

b. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah Desa Sira Jaya Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu, penelitian ini digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Kebijakan Publik

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya".

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2)

menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah

publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Carl J Federick sebagai mana dikutip Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/ kegiatan yang di usulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang di usulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

David Easton sebagaimana di kutib Leo Agustino (2009:19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai "*the autorative allocation of values for the whole society*". Definisi ini menegaskan

bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “*authorities in a political system*” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak di terima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Untuk melakukan studi kebijakan publik merupakan studi yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah. Studi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye, sebagaimana dikutip Wahab (2010:14) sebagai berikut : “ Studi kebijakan publik mencakup menggambarkan upaya kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap kebijakan publik; penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak kebijakan

publik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan”.

Wahab sebagaimana dikutip Suharno (2010:16-19) dengan mengikuti pendapat dari Anderson (1978) dan Dye (1978) menyebutkan beberapa alasan mengapa kebijakan publik penting untuk dipelajari, yaitu:

1. Alasan Ilmiah

Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat. Dalam hal ini kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat (*dependent variabel*) maupun sebagai variabel independen (*independen variabel*). Kebijakan dipandang sebagai variabel terikat, maka perhatian akan tertuju pada faktor-faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan publik. Kebijakan dipandang sebagai variabel independen jika fokus perhatian tertuju pada dampak kebijakan tertuju pada sistem politik dan lingkungan yang berpengaruh terhadap kebijakan publik.

2. Alasan Professional

Studi kebijakan publik dimaksud sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari.

3. Alasan Politik

Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2005:102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai :

“Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini

mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”.

Menurut Teori George Edwards III (dalam Subarsono, 2005:90) Dalam pandangan, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi (2) sumber daya (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan

konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Sumber daya adalah faktor yang paling penting dalam implementasi kebijakan agar berjalan secara efektif. Sumber daya itu dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya fasilitas pendukung. Tanpa adanya sumberdaya, maka kebijakan yang telah dibuat tidak dapat diimplementasikan. Adapun indikator dari sumber daya adalah sebagai berikut :

a) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan implementor dari sebuah kebijakan, sehingga berhasil ataupun tidaknya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh staff atau pegawainya. Apabila sumber daya manusianya cukup memadai dan kompeten dalam bidangnya,

maka implementasi kebijakan publik dapat berjalan secara efektif.

b) Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial adalah kecukupan modal yang dimiliki dalam menjalankan sebuah kebijakan publik, sumber daya finansial juga akan mendukung segala fasilitas yang dibutuhkan untuk terlaksananya kebijakan publik.

c) Sumber Daya Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung merupakan fasilitas fisik yang sangat penting dalam implementasi teknis sebuah kebijakan publik. Apabila sumber daya manusia sudah memadai, namun tanpa adanya fasilitas pendukung yang memadai (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara maksimal.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika

implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

3. Tahap-tahap Implementasi Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi

Winarno (2007:32-34) adalah sebagai berikut :

- a) Tahap penyusunan agenda
- b) Tahap formulasi kebijakan
- c) Tahap adopsi kebijakan
- d) Tahap implementasi kebijakan
- e) Tahap evaluasi kebijakan

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan

Menurut Suharno (2010:52) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (*intended risks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risks*).

Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal ini penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah :

- a) Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar
- b) Adanya pengaruh kebiasaan lama
- c) Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi
- d) Adanya pengaruh dari kelompok luar

e) Adanya pengaruh keadaan masa lalu

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Secara umum, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan Desa. Menurut Sumpeno (2013) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan suatu rencana tahunan keuangan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung perkiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan.

Salah satu sumber pendapatan desa adalah dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan setiap tahunnya 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sehingga untuk meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Provinsi, dan Pemerintah, maka perlu direalisasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setiap tahunnya sebesar 10% untuk Alokasi Dana Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada dasarnya adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas (Sumpeno, 2013):

1. Pendapatan Desa

Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

2. Belanja Desa

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis.

3. Pembiayaan Desa

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan yang

diklasifikasikan menurut kelompok dan jenisnya.

6. Manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada dasarnya disusun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber dana dan pengeluaran atau belanja rutin pembangunan desa. Melalui APBDes, pemerintah dan masyarakat secara jelas dapat menentukan skala prioritas dan operasionalisasi pembangunan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Sumpeno 2011:213).

Secara rinci manfaat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) diantaranya :

- a. APBDes sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi operasional kegiatan berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan dana pendukung.
- b. Indikator dalam menentukan jumlah dan besarnya pungutan yang dibebankan kepada masyarakat secara proporsional.
- c. Bahan pertimbangan dalam menggali sumber pendapatan lain di luar

pendapatan asli desa, seperti melalui pinjaman atau jenis usaha lain.

- d. Memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan administrasi keuangan desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- e. Memberikan arahan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa sekaligus sebagai sarana untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pemerintah desa.
- f. Gambaran mengenai arah kebijakan pembangunan pemerintah desa setiap tahun anggaran.
- g. Memberi isi terhadap model penyelenggaraan pemerintah desa dalam mewujudkan good governance.
- h. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui perencanaan pembangunan dan pembiayaan secara komprehensif.

7. Hasil Penelitian yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitiann yang dilakukan, yaitu :

- a. Ida Mayasari (2015) dalam penelitiannya Tinjauan atas Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berjalan

baik dan penyusunnya sesuai peraturan menteri dalam negeri. Persamaannya adalah meneliti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sedangkan perbedaannya adalah tidak meneliti tentang penyelenggaraan pembangunannya.

- b. Gadis Nurhassanah Agustina (2015) dalam penelitiannya Pengaruh Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Pembangunan Kota Bandung. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa penyerapan anggaran dan belanja daerah kota bandung masih menunjukkan rata-rata yang belum stabil. Persamaannya adalah meneliti pengaruh antara penerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja terhadap pembangunan. Sedangkan perbedaannya adalah berbeda objek penelitian.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat eksploratif dengan analisis data secara kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang bermaksud menggambarkan kejadian atau temuan-temuan data dan gejala-gejala yang terjadi berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya yang terjadi

dilapangan pada saat penelitian dilaksanakan.

2. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peneliti didalam melakukan proses penelitian yaitu

1. Pre Survey
2. Menulis Usulan Penelitian
3. Review Usulan Penelitian
4. Seminar Usulan Penelitian
5. Perbaikan Naskah Usulan Penelitian
6. Melakukan Penelitian Dan Menulis Skripsi
7. Ujian Skripsi

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang akan menjadi sasaran penelitian yaitu di Desa Sira Jaya Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu. Tempat ini menjadi sangat menarik untuk diteliti karena berdasarkan masalah-masalah yang ada penulis merasa perlu untuk melakukan suatu penelitian guna memecahkan masalah tersebut.

Penelitian ini akan diadakan selama ± 1 bulan. Waktu penelitian terbagi menjadi 6 tahapan. Tahapan pertama digunakan untuk pre survey. Kedua, pembuatan usulan penelitian. Ketiga, seminar usulan penelitian. Keempat, penelitian lapangan. Kelima, tahapan penulisan laporan penelitian. Dan berikutnya keenam, adalah ujian skripsi.

4. Objek dan Subjek Penelitian

Menurut sugiyono (2011:38) objek penelitian merupakan atribut dan nilai dari orang ataupun golongan yang memiliki kegiatan yang bervariasi yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya, sehingga yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Subyek penelitian ini adalah aparatur pemerintah desa setempat yang berwenang dalam pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sira Jaya Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk memperoleh informasi serta data yang dibutuhkan sumber data atau informan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Kepala Desa Sira Jaya.
2. Sekretaris Desa Sira Jaya.
3. Bendahara Desa Sira Jaya.
4. Kaur Pemerintahan Sira Jaya.
5. Kaur Keuangan Sira Jaya.
6. Masyarakat 2 orang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung pada objek

penelitian untuk memperoleh data dan informasi. Penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. Observasi : yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan secara langsung dengan cara mengamati objek yang diteliti. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah mengamati secara langsung implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sirajaya Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Wawancara : yaitu teknik pengumpulan data dengan melalui interview secara langsung dengan informan yang mengetahui permasalahan tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sirajaya Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu yang akan diteliti.
3. Dokumentasi : yaitu cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang

berhubungan dengan masalah penyelidikan.

6. Alat Pengumpulan Data

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian. Penelitian ini pada dasarnya adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena-fenomena sosial, maka dalam penelitian ini harus ada alat yang tepat. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Instrumen yang digunakan adalah dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
- b. Alat Pencatat atau laptop, yaitu alat pengumpulan data yang digunakannya itu berupa file atau fotocopi serta catatan ringkasan yang digunakan peneliti untuk mencatat hasil wawancara.
- c. Alat berupa kamera, yaitu alat pengumpulan data berupa dokumentasi setiap wawancara dengan aparatur desa Sira Jaya.

7. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah kegiatan yang bertujuan mendapatkan suatu kredibilitas dengan menggunakan pengecekan dengan berbagai cara, waktu, serta sumber (dalam Sugiyono 2011:273). Triangulasi terbagi menjadi tiga cara yaitu triangulasi sumber,

triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Dalam hal ini peneliti akan melakukan pengecekan data yang didapat dari hasil wawancara dengan pihak terkait maupun dokumentasi yang dapat diperoleh peneliti selama melakukan proses penelitian. Peneliti akan membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa informan tersebut yang mana memungkinkan terdapat perbedaan pendapat maupun sudut pandang antara pihak-pihak yang diwawancarai untuk kemudian diambil kesamaan-kesamaan agar tidak berubah sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Moleong (2004:280281), "Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan

hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data". Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (1992:15-19), adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
2. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.
3. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola pola pengarahan dan sebab akibat.

D. HASIL PENELITIAN

1. Komunikasi

Proses komunikasi yang berjalan tidak maksimal sehingga sasaran dari implementasi tersebut belum tersosialisasikan dengan baik dan maksimal. Dengan tidak berpartisipasinya masyarakat desa maka laporan penyusunan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa tidak akan sesuai tepat waktunya atau kurang optimal jika tidak didukung oleh partisipasi masyarakat setempat, memang dalam beberapa hal seluruh warga masyarakat tidak mungkin dilibatkan dalam membuat kebijakan atau suatu perencanaan pengelolaan, tetapi bagaimanapun dalam membuat suatu perencanaan yang sifatnya untuk kepentingan masyarakat sudah seharusnya pemerintah melibatkan warga masyarakatnya.

2. Sumber Daya

sumber daya manusia aparatur desa masih relative rendah sebab dari 7 orang aparatur desa hanya 1 orang saja yang berpendidikan S1, sedangkan yang lainnya berpendidikan SMA 4 orang dan 2 orang berpendidikan SMP atau sederajat. Kemampuan aparatur desa dalam melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih belum maksimal, yang mana aparatur desa banyak yang belum memahami aplikasi

sistem keuangan desa (Siskeudes) oleh karena itu menyebabkan pelaporan telat setiap tahunnya.

3. Disposisi

Mekanisme yang dilakukan aparatur desa sudah benar, sebelum melakukan kegiatan selalu dimusyawarahkan terlebih dahulu agar terhindar dari konflik yang ada.

Selain itu hasil penjelasan yang diperoleh dari kepala desa dapat diketahui bahwa untuk mempermudah aparatur desa melaksanakan tugasnya dalam menyusun laporan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa selalu di jelaskan terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan dalam menyusun laporan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Prosedur-prosedur kerja antara aparatur-aparatur desa dalam pembagian tugas harus sesuai dengan prosedur, dengan demikian akan terjalin hubungan antar implementor, dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para implementor dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja desa.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Komunikasi

Proses komunikasi dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sira Jaya Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu belum berjalan maksimal dikarenakan dalam penyusunan laporan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, kepala desa tidak mengundang tokoh masyarakat dan hanya aparatur desa yang menghadiri sosialisasi tersebut.

b. Sumber Daya

Sumber daya manusia aparatur desa masih rendah sebab dari 7 orang aparatur desa hanya 1 orang saja yang berpendidikan S1 yaitu Kaur Keuangan, sedangkan yang lainnya berpendidikan SMA 4 orang dan 2 orang berpendidikan SMP atau sederajat. Hal ini lah yang menyebabkan pelaporan tersebut menjadi terlambat dikirim ke Kabupaten.

c. Disposisi

Aparatur desa Sira Jaya telah menunjukkan sikap dan komitmen yang cukup baik dalam menjalankan tugasnya, dapat terlihat dari kerjasama antar aparatur desa dalam menyusun laporan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

d. Struktur Birokrasi

Prosedur-prosedur kerja antara aparaturn-aparatur desa dalam pembagian tugas belum sesuai dengan prosedur yang ada.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Komunikasi

Dengan diberlakukan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diperlukan peran dan tugas serta kerjasama antara kepala desa dengan aparaturn-aparatur dalam pengelolaan keuangan desa. Proses sosialisasi juga dilakukan dengan baik agar pelaporan tersebut berjalan efektif agar tidak terjadi keterlambatan ke Kabupaten.

2. Sumber Daya

Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk memberikan Pendidikan dan pelatihan kepada aparaturn desa agar memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3. Disposisi

Tingkatan lagi sikap atau perpestif yang dimiliki aparaturn-aparatur desa agar pengelolaan keuangan desa tersebut berjalan dengan baik setiap tahunnya dan tidak terjadi keterlambatan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi dalam pengelolaan keuangan desa sudah berjalan dengan baik. Hanya perlu ditingkatkan lagi dengan menggunakan SOP yang ada, agar lebih efektif dan berjalan dengan maksimal.

F. REFERENSI

1. Buku-buku

- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC. Congressional Quarterly Press.
- Gadis Nurhassanah Agustina. 2015. *Pengaruh Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Pembangunan Kota Bandung*. Skripsi.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, M.Si, Drs, 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*, Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.
- Ida Mayasari. 2015. *Tinjauan atas Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*.Skripsi.
- Islamy, Irfan M. 2009. *Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Cetakan ke-15. Jakarta: Bumi Aksara.

Machfud, S. Mahi, B.R., Simanjutak, R., dan Brojonegoro, B. 2002. *Dana alokasi umum konsep hambatan dan prospek di era otonomi daerah*, Jakarta: Salemba Empat.

Moleong, L.J . 2005. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Moleong, L. 2012. *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Ramdani Nela.2012. *Psikologi Untuk Kesejahteraan Masyarakat*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, teori dan aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung. Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Suharno. 2008. *Prinsip – Prinsip Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.

Suharno. 2009. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.

Sumpeno, W. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read

Sutopo, H.B. 2002. *Metodologi penelitian kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta : Med

Press (Anggota IKAPI).

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo.

Wirnano, Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Pressindo:

Yogyakarta.

2. Dokumen

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.